

Tidak Berizin, 1.191 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Diblokir

Tanggal : Selasa , 06 April 2021
Media : Merdeka.com
Halaman : 1
Wartawan : Darmadi Sasongko
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)
Rubrik : uang
Topik : Blokir Entitas Ilegal

Tidak Berizin, 1.191 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Diblokir

Selasa, 6 April 2021 19:00
Reporter : Darmadi Sasongko



Kepala Bappebti Sidharta Utama. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) telah memblokir 1.191 situs domain entitas Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tidak berizin. Angka tersebut merupakan pemblokiran selama 2020.

"Kami selalu memonitor pialang pialang ilegal yang menawarkan produk-produk yang tidak dapat izin. Ini banyak di situs internet," kata Kepala Bappebti Sidharta Utama usai berbicara dalam kuliah umum Universitas Brawijaya (UB) di Hotel Santika Malang, Selasa (6/4).

Domain yang diblokir rata-rata menawarkan produk kontrak berjangka tidak berizin atau abal-abal lewat situs internet. Selanjutnya, Bappebti berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, selaku lembaga yang berwenang mengatur pemblokiran tersebut.

"Kami memblokir tentunya bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, yang punya wewenang pemblokiran. Kami sampaikan daftarinya untuk kemudian diblokir, tahun 2021 sampai 1.191 situs," sambungnya.

Produk yang ditawarkan memiliki risiko tinggi dan berpotensi merugikan masyarakat. Sehingga awalnya yang berniat investasi akan sangat dirugikan oleh produk investasi tersebut.

"Kalau masyarakat membeli risikonya tinggi, kalau misalnya terjadi apa-apa tidak ada yang bisa membantu. Misalnya, tahu-tahu uang nasabahnya hilang. Kalau yang dapat izin tentu bisa mengklaim," jelasnya.

Sidharta mengingatkan agar masyarakat memilih produk dari pialang resmi yang sudah mengantongi izin. Masyarakat jangan percaya dengan janji-janji keuntungan dan harus lebih berhati-hati dalam memilih produknya.

"Cek saja di situs Bappebti atau di bursa, ada hotline, kalau tidak ada di daftar tersebut berarti abal-abal, jangan beli," tegasnya.

Sikap hati-hati juga harus diterapkan di investasi aset kripto yang belakangan sedang naik daun. Masyarakat diminta membeli atau menipkan kepada perusahaan yang resmi dan terdaftar.

"Pastikan membelinya dari yang sudah terdaftar. Sekarang sudah ada 13 pedagang yang sudah terdaftar dan punya tanda daftar. Pastikan dari situ, jangan yang dari luar," ungkapnya.

Sidharta juga menjelaskan, jenis aset kripto yang mencapai ribuan, tetapi kualitasnya banyak yang dipertanyakan. Sehingga Bappebti dalam evaluasinya memilih aset kripto yang bisa diperdagangkan.

"Jadi hanya ada 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan yang memang diakui oleh Bappebti," tegasnya.

Bappebti melakukan evaluasi dalam hal sistem keamanannya dan lain sebagainya, termasuk memastikan dana-dana yang ditransaksikan bukan berasal dari dana ilegal.

"Jadi kami juga melakukan proses cek. Memastikan dana itu tidak digunakan untuk terorisme itu juga dilakukan. Kalau yang ilegal tidak ada proses cek itu," ungkapnya.

Bappebti mengandeng Best Profit Futures (BPF) Malang menggelar kuliah umum Peluang Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era 4.0 dan Membangun Masa Depan dengan Prosesi Menjanjikan. Kuliah umum berlangsung secara hibrid dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. [cob]